

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Anggaran Terbatas

KETUA DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengakui adanya keterbatasan peralatan serta sarana dan prasarana milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Peralatan Dinas Damkar di Kota Lumpia bisa dibilang masih kalah canggih dibandingkan dengan beberapa kota besar lain di Jawa.

Menurut dia, persoalan itu memang menjadi perhatian serius se-

mua pihak. Terlebih, saat ini tren hunian vertikal dan pembangunan gedung-gedung tinggi mulai semarak di Kota Semarang.

Pengadaan alat-alat canggih milik Damkar membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Peralatan-peralatan canggih itu harus diimpor langsung dari luar negeri, dengan harga-

■ KE HALAMAN 7

Anggaran Terbatas

■ DARI HALAMAN 1

nya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Harganya mahal-mahal sekali, tak ada yang murah, butuh anggaran besar," katanya, kepada Tribun Jateng, akhir pekan lalu.

Pria yang karib disapa Mas Pri itu menuturkan, APBD Kota Semarang masih sangat terbatas. Hal itu menjadi kendala untuk pengadaan peralatan-peralatan mahal, karena akan menguras anggaran.

"Anggaran kita terbatas, kita prioritaskan dulu untuk urusan-urusan riil di masyarakat, semisal penanggulangan banjir dan rob," ucapnya.

Kendati demikian, Mas Pri menegaskan, bukan lantas pengadaan alat-alat pemadam kebakaran itu tak penting. Hanya saja, hal itu menunggu ketersediaan anggaran yang memadai. "Akan kami prioritaskan ketika nanti anggaran memadai," tandasnya.

Diketahui, pada tahun anggaran 2018, APBD murni Kota Semarang sebesar Rp 5,1 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 60 persen di antaranya tersedot untuk belanja publik, sementara 40 persen sisanya untuk anggaran belanja pegawai. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 1,7 triliun.

Mas Pri menyatakan, guna menanggulangi ancaman potensi kebakaran, termasuk di gedung-gedung tinggi, bisa dilakukan dengan memaksimalkan keberadaan 'Kader Siaga Api'.

Untuk gedung tinggi, menurut dia, para karyawan dan pihak manajemen harus bisa melokalisir dan menjinakkan api ketika si jago merah belum membesar.

"Salah satu caranya ya mereka harus mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala, agar tak panik saat menghadapi kebakaran," ucap politis PDI Perjuangan itu.

Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 5/2009 tentang Bangunan Gedung dan Perda No. 2/1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sudah daitur mengenai sistem proteksi kebakaran gedung.

Menurut dia, pemilik dan pengelola gedung harus betul-betul memperhatikan hal itu. "Kan ada ketentuan mengenai hal itu. Jika pengelola gedung benar-benar memperhatikan dan mematuhi, potensi kebakaran di gedung tinggi dapat ditekan seminimal mungkin," tegasnya.

Selain memenuhi standar minimal sistem proteksi kebakaran gedung, Mas Pri mengungkapkan, pengelola juga harus rutin melakukan maintenance terhadap semua peralatan yang tercakup dalam sistem.

"Yaitu terkait dengan keberadaan hidran, sprinkler, alarm kebakaran, serta alat pemadam api ringan (APAR)," paparnya. (tim)